

REALITAS MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

Coki Ahmad Syahwier

USU - Unpas

Abstract

A worried of exchange rate can be happened because of raising in world's oil price which will impact on raising of need of foreign exchange in the country. Rupiah's stability can be disturbed by foreign debt especially which comes from CGI's countries that impact on foreign exchange's stock. Based on these factors and non economy factors, the average exchange rate estimated still be pessimistic.

The main problem which related to economic growth is poverty and unemployment that finally related to welfare. In fact, economic growth which increase continuously and doesn't followed by job opportunities symbolized by poverty and unemployment which relatively high. For achieving economic growth, there are many constraints which come from weakly investment and infrastructure because an expenditure allocation sources from national budget are not enough to fulfill the cost activities.

Keywords: *economic growth, exchange rate, foreign debt, poverty, unemployment.*

PENDAHULUAN

Secara umum kondisi makroekonomi hingga triwulan I 2005 menunjukkan perkembangan meningkat dalam dua tahun terakhir sebagaimana tercermin pada indikator pertumbuhan ekonomi (4,88 % - 5,13 %) melampaui target pertumbuhan ekonomi menurut APBN sebesar 4,8 %. Meskipun kondisi makroekonomi tersebut mengalami perbaikan namun beberapa indikator memberi sinyal adanya celah-celah yang kurang begitu menggembirakan seperti tingkat inflasi yang meningkat, nilai tukar Rupiah/dolar AS (rata-rata) yang terkesan

lemah menurut persepsi pasar, tingkat pengangguran yang relative masih tinggi, angka kemiskinan yang cukup besar, dan iklim investasi yang belum kondusif.

Secara tahunan, inflasi terus mengalami penurunan yang konsisten dari 12,55 % - 2001 menjadi 5,06 % - 2003 ; 6,40 % - 2004, tetapi pada triwulan 1 - 2005 inflasi menunjukkan tren yang meningkat hingga mencapai 8,81 % yang diyakini sebagai dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM (*administered price*). Diperkirakan pada triwulan II - IV - 2005, inflasi berpotensi terus meningkat sebagai

akibat gejolak harga yang lebih tinggi dalam jangka pendek dan memburuknya ekspektasi terhadap inflasi terutama didorong oleh kurangnya kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok serta masih relatif tingginya harga bahan baku dasar sejumlah industri di pasar dunia (*Imported inflation*).

Sedangkan pada perkembangan suku bunga SBI 1 bulan menunjukkan penurunan konsisten dari sekira 17 % pada awal 2002 menjadi sekira 7,4 % pada awal 2005. Sedangkan pada suku bunga SBI 3 bulan menurun sebesar 3 bps mencapai 7,27 %. Akan tetapi penurunan suku bunga SBI tersebut seharusnya dapat menjadi *benchmark* bagi suku bunga lainnya seperti suku bunga kredit yang turunnya tidak secepat penurunan suku bunga SBI sehingga menyulitkan bagi dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

Sementara itu perkembangan nilai tukar Rupiah selama beberapa periode terakhir mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan tingkat volalitas yang memang cukup rendah seperti pada bulan Februari yang secara rata-rata mencapai Rp 9.252 per dolar AS atau terdepresiasi sebesar 0,55 %. Namun nilai fundamental rupiah kenyataannya bergeser menjadi Rp 9.100 per dolar AS dengan proyeksi rata-rata kurs tahunan Rp 9.232 – Rp 9.378 per dolar AS. Kalau dibandingkan dengan nilai tukar dalam waktu terakhir yang diatas Rp 9.500 – Rp 9.600 per dolar AS maka dapat diartikan rupiah mengalami depresiasi yang berlebihan (*overshooting*) yang memberi arti sebenarnya kepercayaan masyarakat sudah mulai melemah. Kekhawatiran terhadap nilai

tukar rupiah dapat terjadi dengan meningkatnya harga minyak dunia sehingga akan berdampak pada peningkatan kebutuhan valas di pasar dalam negeri. Stabilitas rupiah dapat semakin terganggu dengan pengaruh utang luar negeri terutama utang yang berasal dari Negara-negara CGI (Consultative Group on Indonesia) dan keadaan ini dapat berdampak terhadap cadangan devisa maupun pasokan valas. Dengan beberapa faktor tersebut ditambah dengan faktor-faktor nonekonomi yang masih dirasakan, diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah hingga akhir tahun 2005 masih akan berada pada lintasan proyeksi nilai tukar yang pesimis.

Sejalan dengan perkembangan dan kondisi makro ekonomi di atas, berbagai indikator makroekonomi mengindikasikan perekonomian domestik paling tidak sampai pada triwulan I – 2005 mengalami pertumbuhan yang bertambah tetapi terkesan lambat. Pada triwulan I – 2005 diperkirakan perekonomian akan tumbuh sekira 5,5 % (y.o.y) dengan sumber-sumber pertumbuhan yang menggambarkan kapasitas ekonomi yang semakin seimbang. Di sisi permintaan sebelumnya kapasitas ekonomi tidak seimbang namun sejak triwulan III – 2004 *share of growth* komponen investasi telah melampaui konsumsi maupun komponen ekspor barang dan jasa. Namun dari kontribusi sektoral terjadi ketimpangan yang sangat senjang antara sektor industri manufaktur dengan sector pertanian, yang ditandai dengan ketidakmampuan sector industri manufaktur menstimulasi atau menggerakkan potensi sektor pertanian.

Tabel 1.

Laju Pertumbuhan PDB, Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Dan Pangsa Terhadap PDB Periode 2001-2004 (Berdasarkan Harga Konstan 2000)

Sektor Ekonomi	2001	2002	2003	2004
Total GDP	3,83 %	4,38 %	4,88 %	5,13 %
Total GDP Without Oil and Gas	5,11 %	5,09 %	5,80 %	6,17 %
Manufacturing industries (Mfg)	3,30 %	5,29 %	5,33 %	6,19 %
Petroleum & Gas	-6,24 %	2,52 %	0,82 %	-4,61 %
Petroleum & Gas: Petroleum Refinery	0,30 %	-3,75 %	2,54 %	5,15 %
Petroleum & Gas: Liquefied Natural Gas	-10,90 %	7,56 %	-0,41 %	-11,83 %
Manufacturing excl. Petroleum & Gas	4,86 %	5,69 %	5,97 %	7,65 %
Food, Beverage & Tobacco	1,07 %	0,19 %	2,69 %	1,66 %
Textile, Leather Product & Footwear	3,40 %	3,23 %	6,18 %	4,23 %
Wood & Wood Product	0,54 %	0,62 %	1,19 %	-2,01 %
Paper & Printing	-4,78 %	5,26 %	8,41 %	7,73 %
Fertilizer, Chemicals & Rubber	0,50 %	4,73 %	10,71 %	9,14 %
Cement & Non-Metallic Mineral	19,08 %	6,56 %	7,06 %	9,56 %
Iron & Basic Steel	-1,00 %	-1,27 %	-7,98 %	-2,68 %
Transport Equipment Machinery & Apparatus	17,22 %	18,09 %	8,88 %	17,65 %
Other Manufacturing Products	12,64 %	-11,08 %	17,73 %	15,12 %
Kontribusi Terhadap Pertumbuhan				
Total GDP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Total GDP Without Oil and Gas	117,08%	103,22%	106,29%	108,48%
Manufacturing industries (Mfg)	23,91%	33,36%	30,46%	33,77%
Petroleum % Gas	-6,36%	2,03%	0,59%	-2,99%
Petroleum % Gas: Petroleum Refinery	0,13%	-1,35%	0,75%	1,42%
Petroleum % Gas: Liquefied Natural Gas	-6,49%	3,38%	-0,17%	-4,41%
Manufacturing excl. Petroleum & Gas	30,28%	31,33%	29,87%	36,77%
Food, Beverage & Tobacco	2,24%	0,35%	4,16%	2,39%
Textile, Leather Products & Footwear	2,90%	2,41%	4,06%	2,69%
Wood & Wood Products	0,20%	0,20%	0,33%	-0,52%
Paper & Printing	-1,79%	1,59%	2,30%	2,07%
Fertilizers, Chemicals & Rubber	0,40%	3,23%	6,59%	5,64%
Cement & Non-Metallic Mineral	3,63%	1,25%	1,23%	1,62%
Iron & Basic Steel	-0,17%	-0,18%	-0,97%	-0,27%
Transport Equipment Machinery & Apparatus	22,21%	23,04%	11,48%	22,53%
Other Manufacturing Products	0,66%	-0,55%	0,67%	0,61%
Pangsa Terhadap PDB				
Total GDP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Manufacturing industries (Mfg)	27,60%	27,85%	27,97%	28,25%
Petroleum & Gas	3,53%	3,46%	3,33%	3,02%
Petroleum & Gas: Petroleum Refinery	1,57%	1,45%	1,42%	1,42%
Petroleum % Gas: Liquefied Natural Gas	1,96%	2,02%	1,91%	1,61%
Manufacturing excl. Petroleum & Gas	24,08%	24,38%	24,64%	25,23%
Food, Beverage & Tobacco	7,85%	7,53%	7,38%	7,13%
Textile, Leather Product & Footware	3,25%	3,22%	3,26%	3,23%
Wood & Wood Products	1,41%	1,36%	1,31%	1,22%
Paper & Printing	1,32%	1,33%	1,38%	1,41%
Fertilizers, Chemicals & Rubber	2,99%	3,00%	3,17%	3,29%
Cement & Non-Metallic Mineral	0,83%	0,85%	0,87%	0,91%
Iron & Basic Steel	0,63%	0,59%	0,52%	0,48%
Transport Equipment Machinery & Apparatus	5,57%	6,31%	6,55%	7,33%
Other Manufacturing Products	0,22%	0,18%	0,21%	0,23%

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Tabel 2.
Pertumbuhan PDB (y. o. y)

Rincian	2004				2004	2005
	I	II	III	IV		I
Total Konsumsi	6,15	5,22	4,04	3,12	4,60	4,8-5,8
Konsumsi Swasta	5,71	5,29	5,05	3,75	4,94	6,0-7,0
Konsumsi Pemerintah	10,06	4,67	-3,80	-1,33	1,95	4,6-5,6
Investasi	11,50	13,10	19,70	18,29	15,71	10,6-11,6
Ekspor Barang dan Jasa	1,20	2,03	17,09	13,72	8,47	11,0-12,0
Impor Barang dan jasa	15,35	25,24	31,97	27,11	24,95	10,4-14,4
PDB	4,38	4,38	6,10	6,65	5,13	5,0-6,7

Keterangan: Tanda (*) Angka Perkiraan

Meskipun investasi cenderung mengalami pertumbuhan yang prospektif, namun bilamana dicermati pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai saat ini bukan didorong oleh komponen investasi melainkan konsumsi. Hal itu menunjukkan sebenarnya tingkat investasi masih dirasakan rendah. Demikian pula dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor terkesan lambat bahkan terdapat kecenderungan sejak triwulan IV – 2004 pertumbuhan ekspor menurun tajam. Pertumbuhan ekspor diperkirakan belum mampu kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum krisis.

ISU-ISU AKTUAL TERKAIT DENGAN MASALAH MAKROEKONOMI

Saat ini paling tidak terdapat tiga masalah pokok yang cukup fenomenal manakala strategi dan kebijakan ekonomi sejak era terdahulu hingga era pemulihan ekonomi seperti sekarang ini belum dikelola dengan baik. Tiga masalah pokok tersebut adalah (i) masih tingginya angka kemiskinan dan

pengangguran (ii) hambatan investasi dan infrastruktur, dan (iii) potensi tekana inflasi yang cukup kuat.

(i) Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Isu krisis ekonomi, kemiskinan dan pengangguran seolah tidak dapat dilepaskan dengan isu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Sejak krisis ekonomi 1997 jumlah orang miskin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Dalam data, provinsi yang jumlah penduduknya besar berpotensi memiliki jumlah penduduk miskin yang juga besar.

Kondisi kemiskinan juga ekuivalen dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator komposit dalam menghitung IPM adalah daya beli masyarakat. Perubahan daya beli masyarakat menunjukkan perubahan pada tingkat kesejahteraan sehingga indikator daya beli menjadi determinan dalam mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka

terhadap jasa kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu belum mampunya pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan lapangan kerja secara berarti tercermin pada angka pengangguran yang relative tinggi yakni sekira 8 % dalam lima tahun

terakhir. Diperkirakan angka pengangguran akan semakin bertambah bilamana pertumbuhan ekonomi actual tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas sector-sektor ekonomi. Kenaikan produktivitas diharapkan dapat menciptakan elastisitas tenaga kerja yang baru.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia
Tahun 2002 – 2003 (Dalam Ribuan)

No.	Provinsi	2002		2003	
		jumlah	peringkat	jumlah	peringkat
1	Jawa Timur	7.701	1	7.578	1
2	Jawa Tengah	7.308	2	6.980	2
3	Jawa Barat	4.938	3	4.899	3
4	Sumatera Utara	1.884	4	1.884	4
5	Lampung	1.651	5	1.568	5
6	Sumatera Selatan	1.601	6	1.397	6
7	Sulawesi Selatan	1.309	7	1.302	7
8	NAD	1.200	9	1.254	8
9	Nusa Tenggara Timur	1.206	8	1.166	9
10	Nusa Tenggara Barat	1.146	10	1.055	10
11	Papua	985	11	917	11
12	Banten	787	12	856	12
13	Riau	722	13	751	13
14	DI Yogyakarta	636	15	637	14
15	Kalimantan Barat	644	14	584	15
16	Sulawesi Tengah	565	16	509	16
17	Sumatera Barat	496	17	501	17
18	Sulawesi Tenggara	464	18	428	18
19	Maluku	419	19	400	19
20	Bengkulu	372	20	344	20
21	Kalimantan Timur	313	22	329	21
22	Jambi	327	21	327	22
23	DKI Jakarta	287	23	294	23
24	Kalimantan Selatan	260	25	259	24
25	Gorontalo	275	24	258	25
26	Bali	222	28	246	26
27	Kalimantan Tengah	231	26	208	27
28	Sulawesi Utara	229	27	192	28
29	Maluku Utara	119	29	119	29
30	Belitung	106	30	98	30
Jumlah		38.394		37.339	

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Table 4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Propinsi-Propinsi Di Indonesia Tahun 1996 Dan 1999

No.	provinsi	IPM			Ranking		
		1996	1999	2002	1996	1999	2002
1	Daerah Istimewa Aceh	69,4	65,3	66,0	9	12	15
2	Sumatera Utara	70,5	66,6	68,8	7	8	7
3	Sumatera Barat	69,2	65,8	67,5	11	9	8
4	Riau	70,6	67,3	69,1	6	4	5
5	Jambi	69,3	65,4	67,1	10	11	10
6	Sumatera Selatan	68,0	63,9	66,0	15	16	16
7	Bangkulu	68,4	64,8	66,2	12	13	14
8	Lampung	67,6	63,0	65,8	16	18	18
9	Bangka Belitung			65,4			20
10	DKI Jakarta	76,1	72,5	75,6	1	1	1
11	Jawa Barat	68,2	64,6	65,8	14	15	17
12	Jawa Tengah	67,0	64,6	66,3	17	14	13
13	D.I. Yogyakarta	71,8	68,7	70,8	2	2	3
14	Jawa Timur	65,5	61,8	64,1	22	22	25

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

(ii) Hambatan Investasi dan Infrastruktur.

Walaupun berdasarkan data, pertumbuhan investasi meningkat namun belum mampu menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi saat ini masih belum menunjukkan kondisi mengingiat hambatan struktural yang selalu menjadi penghalang bagi perkembangan investasi. Beberapa faktor penghambat diantaranya adalah sejumlah regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah yang lebih dipandang sebagai disinsentif, belum terjaminnya kepastian hukum termasuk perlindungan berinvestasi, perpajakan, kinerja birokrasi yang buruk dan jaminan keamanan yang lemah. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya menjadi penyumbang terbesar bagi tingkat *country risk* yang tinggi.

Terpentingnya bagi kegiatan investasi adalah bagaimana memenuhi kondisi kecukupan melalui pembangunan infrastruktur. Namun dalam kenyataannya perhatian untuk meningkatkan infrastruktur masih rendah yang ditandai dengan rasio investasi pemerintah di sector infrastruktur terhadap PNB mengalami penurunan yang tajam dari 5,3 % (tahun 1993) menjadi rata-rata 3,2 % (tahun 2000 – 2004). Kualitas infrastruktur yang buruk juga ditandai dengan kinerja pelayanan penyediaan listrik maupun jaringan informasi dan telekomunikasi ditambah dengan masalah-masalah yang terjadi pada kelembagaan lainnya.

(iii) Tekanan inflasi yang berpotensi terus meningkat

Diperkirakan tingkat inflasi akan mengalami peningkatan sebagai akibat ekspektasi inflasi masyarakat yang dipicu oleh kebijakan pemerintah maupun terjadinya distorsi pada distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok. Tekanan inflasi diperkirakan akan terus menjadi salah satu faktor yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, terutama dipicu oleh *cost push inflation*. Karakteristik jenis inflasi ini biasanya dipicu oleh terjadinya kenaikan pada biaya produksi, baik karena faktor efisiensi maupun akibat dampak tidak langsung dari kebijakan pemerintah.

2. Rekomendasi Kebijakan dalam Mendukung Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan.

a. sebagaimana telah dikemukakan bahwa kenaikan kapasitas perekonomian dalam mencapai pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi bukan investasi, sehingga hal tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah agar permintaan agregat dapat terkendali dan sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi nasional (sector-sektor ekonomi), sehingga dapat menekan laju inflasi.

b. Pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah merupakan langkah

untuk menstabilkan neraca pembayaran dan mengurangi deficit neraca transaksi berjalan, melalui peningkatan ekspor dan penurunan secara relatif nilai impor, serta mengurangi permintaan valas oleh pelaku ekonomi (BUMN, swasta dan pemerintah). Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam mendorong kenaikan cadangan devisa (melalui kenaikan ekspor dan permintaan impor) dan *net capital inflow* melalui kenaikan tingkat suku bunga yang kompetitif serta meningkatkan transaksi di pasar modal.

c. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tetapi kontribusi terbesar datang dari industri manufaktur dan sector manufaktur non migas masing-masing 34 % dan 37 %. Namun sudah cukup diketahui kontribusi sector tersebut sebenarnya merupakan pertumbuhan yang terjadi pada beberapa industri padat modal bukan padat tenaga kerja. Karena itu perlu mengagregasi industri manufaktur yang mampu memberi peluang kerja yang lebih besar untuk mereduksi *over supply* yang terjadi pada sector ketenagakerjaan.

d. Kapasitas perekonomian masih bertumpu pada konsumsi bukan investasi karena tingkat investasi dipandang masih rendah. Terkait dengan hal itu perlu langkah-langkah nyata menyangkut deregulasi dan

debirokratisasi ekonomi guna mengurangi ekonomi biaya tinggi, penyelesaian sejumlah sengketa-sengketa investasi, adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan dalam negeri, perpajakan yang tidak memberatkan, tersedianya infrastruktur dasar pendukung, dan menyederhanakan aturan ketenagakerjaan. Semua itu perlu mendapat dukungan dari sector birokrasi yang bersih.

- e. Dari sisi kebijakan fiscal, rasio hutang terhadap PDB mengandung risiko tinggi karena sudah mendekati 55 % sehingga dapat melemahkan fondasi perekonomian. Disamping itu deficit anggaran yang mencapai sekira 1 % dari PDB 2005 dirasakan cukup mengganggu keseimbangan anggaran Negara. Karena itu pembiayaan dari deficit perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai utang luar negeri dan dalam negeri guna mengantisipasi tingkat risiko sekaligus mengantisipasi beban bunga yang harus dibayarkan. Pembiayaan deficit ini diharapkan tidak menciptakan *crowding out* pembiayaan bagi sektor swasta.
- f. Daya saing ekspor nasional yang menurun sebagai akibat persaingan yang tinggi ditambah dengan kecenderungan banyak Negara termasuk ASEAN yang melakukan *bilateral free trade and investment agreement*

dengan berbagai negara industri maju guna mendorong perdagangan luar negerinya mengharuskan prioritas kebijakan perdagangan luar negeri mencari peluang dan menciptakan terobosan yang spesifik dan baru dalam skema WTO dan bilateral FTA sehingga tercapai struktur ekspor yang tangguh dan berkesinambungan.

PENUTUP

Dari rangkaian pengamatan dan uraian yang telah dikemukakan setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus diskusi yaitu stabilitas makro ekonomi dan masalah-masalah utama yang cukup kompleks dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Stabilitas makroekonomi yang mendapat dukungan dari kapasitas perekonomian dianggap masih belum seimbang karena konsumsi masih menjadi tumpuan utama sumber pertumbuhan ekonomi. Seharusnya untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi peningkatan pembangunan ekonomi nasional, investasi harus menjadi motor penggerak terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi perlu mendapatkan indikator makro ekonomi dari sisi moneter seperti besaran moneter yang terukur, suku bunga dan nilai tukar yang kondusif bagi

perkembangan ekonomi, dan tingkat inflasi yang terkendali dan *predictable*.

Masalah utama yang sudah menjadi isu yang cukup aktual yang sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah masalah kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya bersinggungan dengan masalah kesejahteraan. Dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang terus bertambah tidak diikuti dengan lapangan kerja yang signifikan ditandai dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan mengalami hambatan yang cukup berarti terutama berasal dari lemahnya kegiatan investasi dan minimnya persediaan infrastruktur dasar yang mendukung. Hal itu dapat terjadi karena alokasi pengeluaran yang bersumber dari anggaran Negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Rasio utang luar negeri terhadap PDB yang relatif tinggi memiliki risiko yang tinggi pula ditambah dengan beban bunga dengan jumlah yang besar sehingga deficit anggaran berpotensi menimbulkan *crowding out* bagi sektor swasta.

Ketahanan anggaran negara perlu memperhatikan peningkatan penerimaan Negara melalui kegiatan ekspor yang didukung dengan struktur ekspor yang tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, "Laporan Ekonomi Moneter dan Perbankan (Monetary Policy Review)" *Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter*, Periode Bulanan.
- Bank Indonesia, "Prakiraan Ekonomi Indonesia 2004-2006" *Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter*, Semester II 2004.
- Bank Indonesia, "Laporan Tahunan Bank Indonesia" Berbagai Tahun Penerbitan.
- Badan Pusat Statistik, 2004, "Indikator Ekonomi" Berbagai Terbitan.
- Syahwier, Coki Ahmad, 1999, "Analisis Ekonomi Indonesia : Kajian Terhadap Dimensi Krisis di Indonesia" Bandung.
- Wibowo Dradjad, 2005, "LPS dan Kepercayaan Masyarakat Pasca Penjaminan" *Kompas 20 Juni 2005*.